

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015

Muhammad Ilham

ilham.korga02@gmail.com

Evita Hanie Pangaribowo

evitahp@ugm.ac.id

Abstract

Economic inequality in Indonesia have increased to the highest point ever reported by BPS. The purpose of this study is to analyze the economic inequality and explain effect of independent variable to economic inequality in Indonesia. Analysis of economic inequality is done based on Entropy Theil equation, while the analysis of variables affecting inequality is done based on panel regression. Independent variable that used on this study is HDI (Human Development Index), unemployment, contribution of sector agriculture and manufacture, and FDI (Foreign Direct Investment) and DI (Domestic Investment). Based on the calculation of Entropy Theil, most provinces in Indonesia belong to high inequality class (based on median Entropy Theil 34 provinces in Indonesia). Based on panel regression, it is known that the variable of HDI, unemployment, and contribution of agriculture sector have significant effect to economic inequality in Indonesia.

Key word: economic inequality, Entropy Theil, panel regression, Indonesia

Intisari

Ketimpangan ekonomi di Indonesia telah mencapai titik tertinggi dari yang pernah dilaporkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis ketimpangan ekonomi di Indonesia dan mengetahui pengaruh variabel independen, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), kontribusi sektor pertanian dan manufaktur, serta PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Analisis ketimpangan ekonomi dilakukan dengan persamaan Entropy Theil, sedangkan analisis pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan dilakukan dengan regresi panel. Berdasarkan perhitungan Entropy Theil diketahui bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tergolong ke dalam kelas ketimpangan ekonomi tinggi (didasarkan pada nilai median dari 34 provinsi). Variabel IPM, TPT dan kontribusi sektor manufaktur berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: ketimpangan ekonomi, Entropy Theil, regresi panel, Indonesia

PENDAHULUAN

Menurut Yusuf dkk (2013), ketimpangan telah mengalami peningkatan hingga mencapai titik tertinggi dari yang pernah dilaporkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Kondisi tersebut menjadikan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan publik. Berdasarkan data statistik Indonesia, persentase penduduk miskin di

Indonesia telah menurun dari 23.43% menjadi 11.47% dari tahun 1999 hingga 2013¹. Kondisi tersebut tidak semata-mata menurunkan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data statistik Indonesia, tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0.31 menjadi 0.41 dari tahun 1999 hingga 2013². Ketimpangan

¹ Sumber BPS

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1494>

² Sumber BPS

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>

tersebut timbul sebagai akibat dari ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi yang rendah (World Bank, 2016).

Ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai aspek (World Bank, 2016). Aspek yang mempengaruhi ketimpangan tidak hanya berasal dari aspek manusia semata, melainkan juga dari aspek alam seperti karakteristik geografis dan potensi sumberdaya alam. Ketidakmerataan pembangunan antardaerah di Indonesia menyebabkan ketimpangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya (Angelia, 2010).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks (World Bank, 2016). Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor semata, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor dan umumnya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut di antaranya karakteristik geografis, kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya ekonomi di suatu daerah. Adanya perbedaan potensi sumberdaya di masing-masing daerah di Indonesia dan dengan mengetahui bahwa kondisi ketimpangan ekonomi yang terus meningkat, maka dibutuhkan adanya kajian yang serius terkait dengan bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia. Kondisi inilah yang mendasari penelitian Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 – 2015 dengan gambaran umum terkait dengan kondisi ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia dan menjelaskan

variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam melakukan analisis ketimpangan ekonomi di Indonesia merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS Indonesia. Data yang digunakan dalam melakukan analisis ketimpangan ekonomi berdasarkan Indeks Entropy Theil ialah data PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing provinsi di Indonesia, sedangkan data yang digunakan untuk menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia ialah data IPM, TPT, PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha, dan investasi (PMDN dan PMA) menurut provinsi di Indonesia.

Pengolahan Data

Pengolahan data terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pengolahan data untuk melakukan analisis ketimpangan ekonomi berdasarkan Indeks Entropy Theil. Kedua, pengolahan data untuk menentukan variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Mengacu pada Yuliani (2015), Indeks Entropi Theil yang digunakan sebagai berikut

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) \log \left[\frac{\frac{y_j}{Y}}{\frac{x_j}{X}} \right] \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan

- I : Indeks Entropy Theil
- y_j : PDRB per kapita provinsi j
- Y : rata-rata PDRB per kapita Indonesia
- x_j : jumlah penduduk provinsi
- X : jumlah penduduk Indonesia

Variabel independen yang digunakan dalam analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia ialah investasi, TPT, kontribusi sektor pertanian dan manufaktur serta IPM. Mengacu pada model yang digunakan Kurniawan dan Sugiyanto (2013), persamaan

yang digunakan dalam analisis regresi panel ialah

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1(inv)_{it} + \beta_2(TPT)_{it} + \beta_3(sp)_{it} + \beta_4(sm)_{it} + \beta_5(IPM)_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan

Y_{it} : ketimpangan ekonomi

$\beta_1 - \beta_5$: koefisien regresi

inv : investasi

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

sp : kontribusi sektor pertanian

sm : kontribusi sektor manufaktur

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

ϵ : error

Analisis Hasil

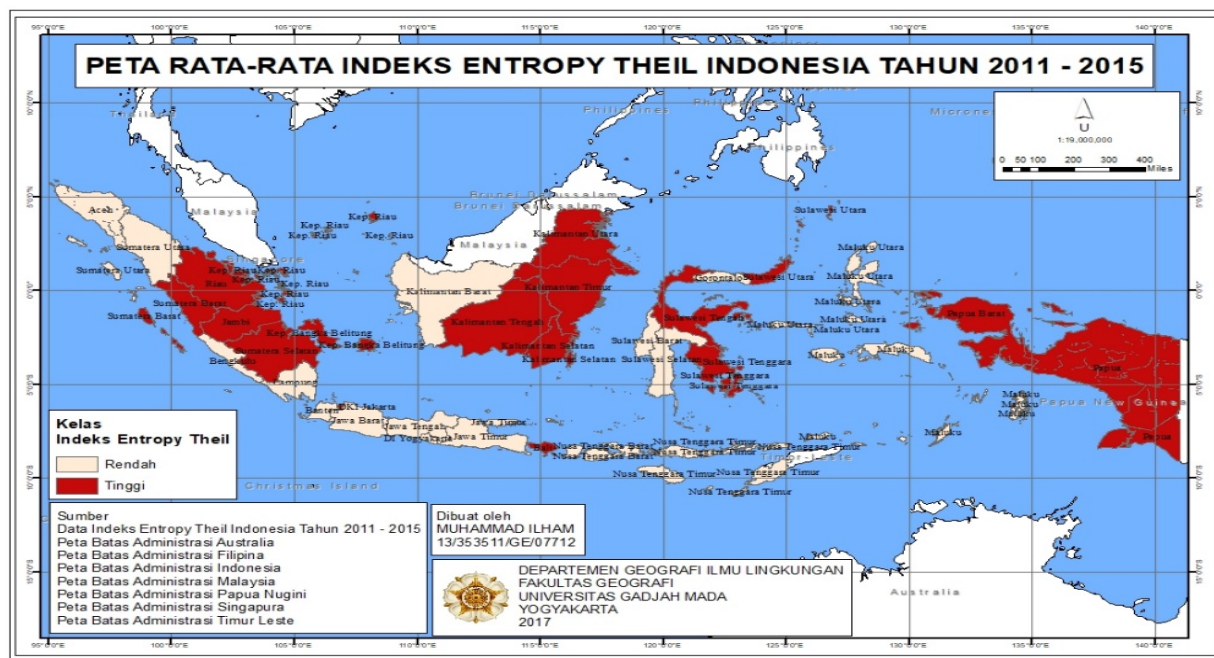
Analisis hasil dilakukan dengan metode statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2006), statistik deskriptif merupakan analisis data statistik dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa adanya maksud untuk melakukan generalisasi. Data hasil pengolahan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketimpangan Ekonomi Berdasarkan Indeks Entropy Theil

Ketimpangan ekonomi muncul seiring dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan terjadi karena pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terjadi secara tidak merata di berbagai provinsi (Kurniawan dan Sugiyanto, 2013). Indeks Entropy Theil merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk melihat ketimpangan antardaerah. Berikut merupakan peta rata-rata Indeks Entropy Theil menurut provinsi di Indonesia tahun 2011 - 2015



Gambar 1 Peta Rata-Rata Indeks Entropy Theil Indonesia Tahun 2011 – 2015

Sumber: *output ArcGIS*, 2017

Gambar 1 menjelaskan persebaran kelas ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia. Berdasarkan rata-rata Entropy Theil dari tahun 2011 – 2015, sebagian besar provinsi di Indonesia berada

pada kelas ketimpangan tinggi. Kelas ketimpangan didasarkan pada nilai median, apabila Indeks Entropy Theil memiliki nilai lebih tinggi dari median (1,16) digolongkan ke dalam kelas ketimpangan tinggi,

sedangkan kelas ketimpangan rendah memiliki Indeks Entropy Theil lebih rendah dibandingkan dengan median (1,16). Provinsi Riau (4,45), DKI Jakarta (7,87), Bali (1,46), Kalimantan Timur (9,68), Sulawesi Utara (1,54), dan Papua Barat (4,79) merupakan daerah dengan Indeks Entropy Theil tertinggi di masing-masing koridor ekonomi Indonesia.

Mengacu pada persamaan yang digunakan, semakin tinggi jumlah PDRB per kapita provinsi akan menyebabkan Indeks Entropy Theil juga akan semakin tinggi, terlebih apabila PDRB per kapita provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita nasional. Contoh kasus seperti Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita berkisar Rp124,331,344.41. Nilai tersebut jauh melebihi rata-rata PDRB per kapita nasional yang berkisar Rp33,656,623.96.

Variabel yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Penentuan Model Estimasi

Regresi panel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model estimasi diantaranya CEM (*Common Effect Model*), FEM (*Fixed Effect Model*), dan REM (*Random Effect Model*). Model estimasi yang digunakan ditentukan berdasarkan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Berdasarkan Uji Chow diperoleh nilai *cross section* sebesar 0,0000 ($< 0,05$) sehingga model estimasi yang digunakan ialah FEM. Berdasarkan Uji Hausman diperoleh nilai *cross-section random* sebesar 0,0002 ($< 0,05$) sehingga model estimasi yang digunakan ialah FEM.

Berdasarkan uji Chow dan Hausman diperoleh estimasi FEM. Berikut merupakan hasil regresi panel dengan menggunakan estimasi FEM

Tabel 4 Estimasi FEM (Fixed Effect Model)

| Variabel | Koefisien | Std. Error | t-Statistik | Prob. |
|------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|
| Konstanta | 3.906945 | 0.503892 | 7.753539 | 0.0000 |
| IPM | -0.038706 | 0.006888 | -5.619087 | 0.0000* |
| TPT | -0.024222 | 0.006900 | -3.510685 | 0.0006* |
| Kontribusi sektor pertanian | -0.032007 | 0.070510 | -0.453931 | 0.6507 |
| Kontribusi sektor manufaktur | 0.254598 | 0.036559 | 6.964049 | 0.0000* |
| PMDN | 0.005142 | 0.004282 | 1.200918 | 0.2322 |
| PMA | 0.000155 | 0.006114 | 0.025432 | 0.9798 |

Keterangan : * probabilitas pada α 5%

Sumber: *output* Eviews 9, 2017

Variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai prob. kurang dari α (0.05). Berdasarkan Tabel 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia dari tahun 2011 – 2015 ialah X1 (IPM), X2 (TPT), dan X4 (kontribusi sektor manufaktur). Berdasarkan hasil tersebut diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut

$$Y_{it} = 3,906945 - 0,038706 X1_{it} - 0,024222 X2_{it} + 0,254598 X4_{it}$$

Keterangan

Yit : estimator ketimpangan ekonomi daerah ke-i dan tahun ke-t

X1 it : variabel Indeks Pembangunan Manusia

X2 it : variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

X4 it : variabel kontribusi sektor manufaktur

Berdasarkan hasil estimasi FEM, variabel independen yang digunakan mempengaruhi variabel dependen sebesar 99.87%. Sisanya, 0.13% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan. Berikut merupakan hasil regresi variabel independen (IPM, TPT, PMDN,

PMA, kontribusi sektor pertanian, dan kontribusi sektor manufaktur) terhadap variabel dependen (ketimpangan ekonomi berdasarkan Indeks Entropy Theil).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil regresi data panel IPM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 (kurang dari 0.05 dinyatakan signifikan). Kenaikan 1% IPM akan menurunkan ketimpangan ekonomi sebesar 0.038706.

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen (Ma'aruf dan Latri, 2008) dan penelitian Putri dkk (2015) diketahui bahwa IPM yang tinggi mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi. Perlu digarisbawahi bahwa dampak positif dari adanya ketimpangan ialah memacu persaingan antardaerah menjadi lebih baik (World Bank, 2016). Adanya pemerataan IPM akan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat menurunkan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan hasil regresi data panel TPT memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0006 (kurang dari 0.05 dinyatakan signifikan). Kenaikan 1% TPT akan menurunkan ketimpangan ekonomi sebesar 0.024222.

Hasil berbeda dalam penelitian Lessman (2006) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi akan berdampak pada peningkatan ketimpangan ekonomi. Selain itu, semakin banyak jumlah orang yang bekerja, maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang karena masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan (Yacoub, 2012).

Menurut World Bank (2016), sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, akan tetapi pemerataan tersebut berada pada kelas perekonomian yang rendah. Mengacu pada pernyataan tersebut, dilihat dari segi pemerataan ekonomi masyarakat dengan tingginya tingkat pengangguran akan berdampak pada penurunan ketimpangan ekonomi, akan tetapi dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan di Indonesia.

Kontribusi Sektor Pertanian

Berdasarkan regresi data panel kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas kontribusi sektor pertanian sebesar 0.6507 (lebih dari 0.05 dinyatakan tidak signifikan). Kenaikan 1% kontribusi sektor pertanian akan menurunkan ketimpangan ekonomi sebesar 0.032007.

Hasil tersebut sejalan dengan pernyataan Budiono dan Prayudi (2015) yang menyatakan bahwa penguatan sektor pertanian akan membawa dampak terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia, akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan (Nguyen, 2010). Tidak signifikannya pengaruh sektor pertanian terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat disebabkan karena semakin dominannya pengaruh sektor non pertanian di Indonesia (Bantika dkk, 2015).

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumberdaya alam yang berlimpah (OECD, 2015). Artinya Indonesia memiliki kemampuan yang kuat di sektor pertanian. Dilihat dari kondisi sebenarnya, produktivitas sektor pertanian masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas sektor pertanian

dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu pengaruh siklus iklim, khususnya kemarau panjang yang disebabkan oleh gejala El Nino (Budiono, 2016). Karena memiliki produktivitas yang rendah, upah terhadap tenaga kerja di sektor pertanian juga rendah (Budiono, 2016; World Bank, 2016), dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat (Yacoub, 2012).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memaksimalkan produktivitas pertanian ialah penggunaan teknologi dan adanya kerjasama antara petani lokal dengan perkebunan besar atau industri makanan. Menurut Grabowski (2013), produktivitas sektor pertanian dapat membantu pengembangan keunggulan potensi sektor manufaktur, dan kondisi tersebut dapat terjadi dengan bantuan teknologi dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain dapat meningkatkan produktivitas pertanian, adanya kerjasama petani dengan perkebunan besar atau industri makanan dapat memperkecil kemungkinan kegagalan para petani dalam mendistribusikan hasil pertanian, dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia (OECD, 2015).

Kontribusi Sektor Manufaktur

Berdasarkan hasil regresi data panel kontribusi sektor manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas kontribusi sektor manufaktur sebesar 0.0000 (kurang dari 0.05 dinyatakan signifikan). Kenaikan 1% kontribusi sektor manufaktur akan meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 0.254598.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Sugiyanto (2013) yang menyatakan bahwa kontribusi sektor manufaktur dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi. Bonet (2006) juga menyatakan bahwa perbedaan sumberdaya dapat meningkatkan ketimpangan

antardaerah karena daerah dengan sumberdaya yang tinggi mampu menghasilkan produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan sumberdaya yang rendah.

Kementerian Perindustrian (2013) menyatakan bahwa sektor industri manufaktur mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan industri pengolahan yang terus meningkat. Besarnya kontribusi sektor manufaktur disebabkan karena *output* dari proses produksi merupakan barang yang dapat diperdagangkan dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Sifat dapat diperdagangkan ini akan mampu menggerakkan rantai nilai dari produsen hingga konsumen akhir, dan berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan (Silalahi, 2014).

Perbedaan yang cukup timpang dalam kontribusi sektor manufaktur antardaerah dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi (Kurniawan & Sugiyanto, 2013). Kondisi tersebut disebabkan karena daerah yang satu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Guna meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi yang disebabkan karena perbedaan kontribusi sektor manufaktur, pemerintah sedang mencanangkan program penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa. Menurut Kementerian Perindustrian (2013), beberapa provinsi di luar Pulau Jawa dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang besar ialah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku. Adanya penyebaran sektor industri manufaktur diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antardaerah di Indonesia karena masing-masing daerah mampu meningkatkan potensi masing-masing daerah.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan hasil regresi data panel PMDN memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.2322 (lebih dari 0.05 dinyatakan tidak signifikan). Kenaikan 1% PMDN akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.005142.

Hasil tersebut sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa investasi mampu meningkatkan kapasitas barang modal (Sukirno, 1996). Peningkatan kapasitas barang modal akan meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan ketimpangan ekonomi antardaerah. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sebab dengan adanya investasi akan mendorong produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Perbedaan investasi di masing-masing daerah di Indonesia akan meningkatkan ketimpangan ekonomi, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang dengan adanya investasi akan dapat menurunkan tingkat ketimpangan apabila terjadi pemerataan investasi di masing-masing daerah di Indonesia.

Menurut Sadono (1994) dalam Krinantiya (2014) jumlah investasi bergantung pada beberapa hal diantaranya ialah besarnya keuntungan yang diperoleh dalam suatu kegiatan ekonomi, suku bunga, tingkat keuntungan di masa depan, ramalan keadaan ekonomi di masa depan, dan penggunaan teknologi. Pemerataan investasi akan tercapai apabila masing-masing pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan data yang ada, PMDN di Indonesia masih bersifat fluktuatif dari tahun 2011 – 2015, dan jumlah PMDN yang jauh berbeda di masing-masing provinsi.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan hasil regresi data panel PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.9798 (lebih dari 0.05 dinyatakan tidak signifikan). Kenaikan 1% PMA akan meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 0.000155.

PMA memiliki dampak positif terhadap peningkatan keuntungan sebuah proses produksi, transfer teknologi dan pengenalan teknologi proses produksi baru, keahlian manajerial, pelatihan tenaga kerja, dan akses ke jaringan internasional (Effendi & Soemantri, 2003) dan memberikan efek multiplier yang tinggi dalam penyerapan tenaga kerja terampil dan tenaga ahli khusus (Latip, 2009; Prasaja, 2013). Kondisi tersebut menyebabkan tingginya produktivitas ekonomi di daerah bersangkutan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung dapat menimbulkan ketimpangan yang tinggi antardaerah di Indonesia (Kurniawan & Sugiyanto, 2013; Yusuf dkk, 2013).

PMA umumnya berinvestasi pada sektor yang padat karya seperti sektor manufaktur dan jasa. Kedua sektor tersebut mampu memberikan upah yang tinggi terhadap tenaga kerja (Budiono, 2016; Putri dkk, 2015) sehingga menimbulkan ketimpangan antardaerah. Walaupun demikian, menurut Kholis (2012) Indonesia belum menjadi prioritas sebagai tempat untuk menginvestasikan modal pada investor asing. Kondisi tersebut disebabkan banyaknya hambatan masuk bagi investor asing, birokrasi yang kurang efisien, dan infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi tersebut menyebabkan kurang signifikannya pengaruh PMA terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Mengacu pada World Bank Group (2017) Indonesia berada pada peringkat 151

pada tahun 2017 dalam hal kemudahan dalam memulai bisnis. Kemudahan dalam memulai bisnis tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti prosedur dalam memulai bisnis, biaya awal yang harus dikeluarkan, dan indikator lainnya. Selain prosedur yang rumit, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga cukup besar seperti dalam hal izin konstruksi, perusahaan harus mengeluarkan biaya 5.1% dari *warehouse value* dan dalam hal pendaftaran property perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 10.8% dari *property value*. Kesulitan dalam memulai bisnis tersebut akan berdampak pada rendahnya minat para investor untuk membuka perusahaan di Indonesia. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan jumlah lapangan pekerjaan dan produktivitas ekonomi.

Mengacu pada hipotesis Kusnetz yang menyatakan bahwa ketimpangan di awal pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat yang tinggi, akan tetapi seiring berjalannya waktu setelah mencapai titik tertinggi ketimpangan akan mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Caska & Riadi, 2008; Chang dan Rati, 2000; Mauliddiyah, 2014). Berdasarkan hipotesis tersebut dapat dikatakan bahwa di awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan memang akan terjadi dengan tingkat yang relatif tinggi, akan tetapi dengan adanya pemerataan dan kontinuitas pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan ketimpangan. Hal tersebut juga berlaku terhadap investasi di masing-masing provinsi di Indonesia. Apabila telah terjadi pemerataan investasi, maka dapat menurunkan tingkat ketimpangan.

KESIMPULAN

Sebagian besar provinsi di Indonesia tergolong ke dalam kelas ketimpangan tinggi. Adapun provinsi dengan Indeks Entropy Theil yang paling tinggi ialah Provinsi Riau,

Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat dengan rentang indeks ketimpangan antara 4 – 9, sedangkan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur tergolong ke dalam kelas ketimpangan rendah dengan indeks ketimpangan berkisar di bawah 0.5.

Variabel IPM dan TPT berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia, variabel kontribusi sektor manufaktur berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, sedangkan variabel kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia dan variabel PMDN dan PMA berpengaruh positif tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, Yuki (2010). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik (2008). *Indeks Pembangunan Manusia 2006 – 2007*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: BPS.
- Bantika, Vredrich, Benu Olfie L. Suzana, dan Gene H. M. Kapantow (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara. *Jurnal* 6(17) (diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/10460/10046> Rabu, 26 April 2017, pukul 20:57).
- Budiono dan Prayudi S. Prabowo (2015). Gambaran Umum Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dalam Persiapan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal of Research in Economic and Management*, 15(1), 182 – 189.

- Caska dan RM Riadi (2008). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal*.
- Chang, Jih Y. dan Rati Ram (2000). Level of Development, Rate of Economic Growth, and Income Inequality. *Economic Development and Cultural Change*, 48(4), 787 – 799.
- Effendi, Nury dan Femmy M. Soemantri (2003). Foreign Direct Investment and Regional Economics Growth in Indonesia: A Panel Data Study. *Working Paper in Economics and Development Studies*.
- Grabowski, Richard (2013). Agricultural Productivity and Industrialization. *Forum for Development Studies*, 2013 40(2), 309 – 325.
- Hoelman, Mickael B., Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, dan Hamong Santono (2015). *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: INFID.
- Kementerian Perindustrian (2013). Industri Indonesia Berjaya di Pasar Lokal Bersaing di Pasar Global *Media Industri No. 05*.
- Kholis, Muhammad (2012). Dampak Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 111 – 120.
- Krinantiya, N. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, Benedictus Riandoko Adi dan F. X. Sugiyanto (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002 – 2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1 – 14.
- Latip, Dedi (2009). Analisa Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Tahun 2000-2006. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Lessman, Christian (2006). Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries. *Ifo Working Paper* (25).
- Ma'aruf, Ahmad dan Latri Wihastuti (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 9, No. 1, April 2008*: 44 – 55
- Mauliddiyah, Alfiana (2014). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012). *Jurnal JESP*, 6(2).
- Nguyen Viet Cuong (2010). Does Agriculture Help Poverty and Inequality Reduction? Evidence from Vietnam. *Agriculture Economic Review*, 11(1).
- OECD (2015). *Survei Ekonomi OECD Indonesia Ikhtisar*. OECD.
- Putri, Yosi Eka, Syamsul Amar, dan Hasdi Aimon (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTseHt26DPAhUBto8KHXP8CPkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fejournal.unp.ac.id%2Findex.php%2Fekonomi%2Farticle%2Fdownload%2F5348%2F4227&usg=AFQjCNHgLkDxUr0>)

[UGTZll-ypK-zeV1Zzmw&sig2=bbeFQFDJU7zshG59ghrS5Q&bvm=bv.133387755,d.c2I](https://www.researchgate.net/publication/311811111)

Rabu, 21 September 2016, pukul 21:59).

- Prasaja, Mukti Hadi (2013). Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economic Development Analysis Journal*, 2(3), ISSN 2252 – 6889.
- Silalahi, Sahat Aditua F. (2014). Kondisi Industri Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1 – 13.
- Sugiyono (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono (1996). *Pengantar Teori Makroekonomi: Edisi Kedua*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- World Bank (2016). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- World Bank Group (2017). *Doing Business 2017 Equal Opportunity for All Economy Profile 2017 Indonesia*. World Bank Group.
- Yacoub, Yarlina (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal* 8(3), 176 – 185.
- Yusuf, Arief Anshory, Andy Sumner, dan Irlan Adiyatma Rum (2013). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013. *Working Paper in Economic and Development Studies No. 201314*. Bandung: Departmen of Economics Padjadjaran University.